
Analisis Pengaruh Dana alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Sumatera Utara)

Evanina Sianturi
Universitas Sumatera Utara
ninasianturi07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengetahui apakah terjadi *Flypaper Effect* pada Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini menggunakan model kuantitatif asosiatif kausal dimana data yang digunakan bersumber dari data sekunder yaitu dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada tahun 2013 sampai 2016. Adapun penelitian ini memberikan hasil yaitu yang pertama memperlihatkan bahwa dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Utara dengan nilai $t_{hitung} 21,367 > t_{tabel} 1,993$ dan nilai signifikansi variabel DAU adalah 0,000, $t_{hitung} 8,367 < t_{tabel} 1,993$ dan nilai signifikansi variabel PAD adalah 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 dan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Utara dengan nilai F_{hitung} adalah $10,087 > F_{tabel} 3,12$, dengan signifikansi 0,014 yang lebih kecil dari 0,05. Kedua, Adanya *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Utara yang meliputi belanja daerah pada 15 pemerintahan Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara. Pada hasil perhitungan statistik menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 96,67% sedangkan sisanya sebesar 3,3% diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis.

Keyword : DAU, PAD, Belanja Daerah dan Flypaper Effect.

I. PENDAHULUAN

Desentralisasi keuangan otonomi daerah adalah bentuk reformasi yang mengharuskan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan yang baik di tandai dengan adanya kejelasan dan akuntabilitas yang kemudian direvisi menjadi memberikan wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk menangani dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah terhadap pemberlakuan otonomi daerah.

Pemerintahan daerah wajib memberikan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) artinya pendapatan dan belanja. Pendapatan bersumber dari sumber-sumber penerimaan daerah yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan belanja yang dimaksud adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Terjadi peningkatan belanja pemerintah daerah yang terlalu besar dalam mengeluarkan belanja daerah yang dicatat oleh depkeu (2020) tahun 2013 sebesar 14.406.669 dan tahun 2016 sebesar 23.516.223. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 yang isinya memberi dukungan desentralisasi fiskal dengan cara Pemerintah Pusat mendistribusikan Dana Perimbangan yang mana salah satu diantaranya adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam rangka menutupi kebutuhan pengeluaran (*expenditure assignment*), DAU memegang peran utama dibandingkan peran PAD dalam APBD (Santoso, 2014). Peningkatan DAU Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 sebesar 8.646.543 sampai tahun 2016 sebesar 12.118.221, angka ini menyertakan depedensi Provinsi Sumatera Utara terhadap dana alokasi umum.

Terdapat sumber pendanaan sendiri pada pemerintahan yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang artinya sumber-sumber penerimaan diterima berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan PAD adalah memberi keleluasaan bagi daerah dalam mengeksplorasi pendanaan yang terdiri atas belanja daerah dan mewujudkan otonomi daerah sebagai asas desentralisasi. Sumber utamanya adalah pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Munculnya fenomena yang berbeda antara penurunan PAD sebesar 2.589.588 pada tahun 2016 tidak berimbang dengan peningkatan DAU sebesar 12.119.228 dan belanja daerah sebesar 23.515.432 yang mengartikan bahwa Provinsi Sumatera Utara bergantung pada dana alokasi umum sehingga belum dapat mengelola potensi-potensi yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Alokasi Umum

Dana ada untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah

yang diterima dari pendapatan negara dan didistribusikan kepada daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dalam hal mendanai keperluan daerah sebagai wujud desentralisasi (Nordiawan, 2011). DAU untuk suatu daerah dianggarkan berdasarkan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*) sehingga formulanya terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah selisih antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal. Dan untuk menghitung alokasi dasar dilihat dari banyaknya jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Atas dasar celah Fiskal suatu Provinsi maka DAU dihitung dari perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh Provinsi. Bobot provinsi adalah hasil perbandingan celah fiskal provinsi dengan total celah fiskal seluruh provinsi dalam (Nordiawan, 2011), dan merumuskan formula seperti berikut:

$$\text{DAU Provinsi} = \text{Bobot Provinsi} \times \text{DAU Pr}$$

$$\text{Bobot Provinsi} = \frac{\text{Celah Fiskal Provinsi}}{\sum \text{Celah Fiskal Provinsi}}$$

Belanja Daerah

Belanja daerah ada untuk melindungi dan meningkatkan prioritas-prioritas dalam lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan bentuk pelayanan-pelayanan masyarakat dan pengembangan jaminan sosial yang dihadirkan dalam Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Renyowijoyo, 2010). Pengukuran belanja daerah yaitu Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah

Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber pendapatan dan penerimaan keuangan daerah dalam rangka membiayai aktivitas pelaksanaan tugas pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hak untuk menajalankan otonomi seluas-luasnya dalam hal mengurus pemerintahan sendiri (Nordiawan, 2011). Pengukuran pendapatan asli daerah yaitu Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan + Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

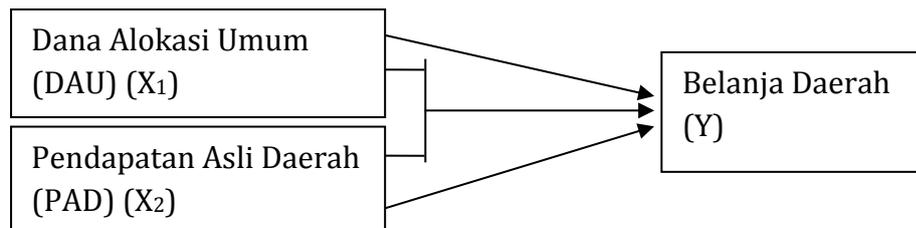
Efek Flypaper

Suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/grants atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat (*unconditional grants*) daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah. Sebuah kondisi yang umum yang terjadi dimana terjadi transferan antar pemerintah dalam suatu negara terkait sistem pemerintahan dan menjadi ke khasan yang menonjol dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Adapun tujuan dasar dalam pengimplementasian transferan ini adalah untuk mengatasi masalah eksternalitas, koreksi ketidakseimbangan vertikal, mencapai tujuan pembangunan dan pemerataan fiskal antardaerah (*horizontal equity*).

Efek Flypaper dikendalikan oleh dua versi yaitu peningkatan pajak daerah serta anggaran belanja pemerintahan yang berlebihan dan elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. Tidak ada perbedaan yang terjadi pada flypaper effect dengan kondisi

Pendapatan Asli Daerahnya tinggi maupun rendah (Maimunah, 2010). Namun, Pendapatan daerah merupakan syarat utama dalam mengupayakan belanja daerah (Pevcin, 2011). Beberapa penelitian mengenai perilaku Pemerintah Daerah dalam merespon transfer Pemerintah Pusat yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa respon Pemerintah Daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya sendiri. Ketika respon Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer dibanding pendapatan daerahnya sendiri maka disebut *flypaper effect*.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Diagram Kerangka Konseptual

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kuantitatif asosiatif kausal. Asosiatif kausal untuk mengukur hubungan antara variabel DAU dan PAD dengan variabel belanja daerah dimana variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen, maka dapat dinyatakan bahwa variabel DAU dan PAD menyebabkan variabel belanja daerah.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang telah dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain.

Sumber Data

Data diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet situs Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia yaitu www.depkeu.djpk.go.id dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LKPD) laporan kinerja pemerintah daerah yang sudah diaudit BPK pada tahun 2013 sampai 2016.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Pengumpulan data sekunder yang relevan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Data yang diambil berupa Dana Alokasi Umum, realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah dari Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari internet melalui website www.depkeu.djpk.go.id yang berupa data series.

Uji Normalitas

Uji Normalitas data berguna untuk tahap awal dalam metode pemilihan analisis data (Erlina, 2014). Data normal menggunakan statistik parametrik dan data tidak normal menggunakan statistik non parametrik atau lakukan treatment agar data normal. Pengujian ini diperlukan karena untuk melakukan uji t dan uji F

diasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui distribusi normal dalam model regresi variable pengganggu atau residual. Jika asumsi ini dilanggar atau tidak dipenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Uji Autokorelasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series, sehingga memerlukan pengujian autokorelasi. Adapun tujuan dari pengujian model ini untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periodet dengan kesalahan pengganggu pada periodet-1. Ada tidaknya autokorelasi ditentukan dengan uji run test. Dasar pengambilan keputusan dalam uji run test yaitu :

1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil < dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi.
2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar > dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Tujuan dari Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikoloniearitas terjadi dalam analisis regresi berganda apabila variabel-variabel bebas saling berkorelasi yang dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan variabel independen mampu menjelaskan variabel independen yang lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikoloniearitas adalah nilai Tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$ ".

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda dinilai baik jika model tersebut memiliki asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik baik normalitas, multikolinieritas dan autokorelasi. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis yang berbunyi Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah, berpengaruh terhadap Belanja Daerah adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Pada dasarnya uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas dapat menerangkan variasi variabel terikat. Analisis korelasi parsial (*Partial Correlation*) digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dimana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap (sebagai variabel kontrol). Nilai korelasi (r) berkisar antara 1 sampai -1, nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio". Hipotesis statistik yang diajukan adalah: $H_0: b_1, b_2 = 0$, artinya suatu variabel independen secara parsial

Kriteria yang digunakan dalam menerima atau menolak hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F berfungsi untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam metode mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang diuji yaitu semua parameter dalam model sama dengan nol, artinya suatu variabel independen dapat menjelaskan secara signifikan terhadap variabel dependen". Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

- 1) $H_0: b_1, b_2, = 0$, artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) $H_a: b_1, b_2, \neq 0$, artinya suatu variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria yang digunakan dalam menerima atau menolak hipotesis adalah:

- a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Jika nilai R^2 semakin kecil mendekati nol, berarti variabel-variabel independen hampir tidak memberikan semua informasi.

Pendeteksi Efek Flypaper

Terjadinya efek flypaper jika nilai koefisien dana alokasi umum lebih besar dari pendapatan asli daerah (PAD).

III. PEMBAHASAN

Secara Parsial DAU Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Karena *unconditional grants* menjadi bukti transfer yang paling penting selain alokasi khusus maka dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa DAU terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Transfer menjadi bukti tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah dapat dilihat dari tujuannya sebagai pengurang ketimpangan keuangan dan menciptakan aktivitas dari stabilitas perekonomian daerah. DAU merupakan alokasi dari APBN yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dalam membiayai pengeluaran desentralisasi. Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa daerah kota dan kabupaten di provinsi Sumatera Utara memiliki ketegantungan dalam hal keuangan yang sangat tinggi pada pusat. DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Panggabean, 2014).

Secara Simultan PAD berpengaruh Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

PAD menjadi penerimaan yang bersumber dari wilayah sendiri yang diterima berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tinggi rendahnya PAD berpengaruh pada tinggi rendahnya stimulus pada belanja daerah.

Kemandirian pemerintahan daerah dalam menggali potensi yang berasal dari potensi daerah menjadi faktor kemandirian dalam APBD. Adapun target PAD yang diterapkan oleh pemerintahan daerah berdasarkan pada dua objek yaitu potensi daerah dan realisasi PAD pada tahun sebelumnya sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besarnya realisasi pendapatan yang diperoleh dari PAD maka semakin besar juga dana pengalokasian daerah yang disalurkan pemerintahan daerah pada tahun selanjutnya. Maka berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa PAD terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal yang sama juga di utarakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Secara Simultan DAU dan PAD berpengaruh Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa DAU dan PAD terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, dengan F_{hitung} adalah $10,09 > F_{tabel}$ 3,16, dengan angka signifikansi 0,016 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Hidayah Hurul (2014), yang menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari (Panggabean, 2014), dimana DAU dan PAD terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Analisis Uji R^2

Berdasarkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,967. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 96,76%, sedangkan sisanya sebesar 3,38% (100% - 96,7%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis. Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,964 yang artinya 96,4% pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian ini dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti silpa, dana alokasi khusus dan lain-lain.

Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Bukti dari terjadinya *Flypaper Effect* pada belanja daerah di provinsi Sumatera Utara dilihat dari analisis data dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa DAU lebih besar dari PAD. Adapun penyebabnya adalah *Flypaper Effect* menjadi suatu kondisi yang menstimulus pengeluaran daerah karena adanya perubahan dalam jumlah transfer (DAU) dari pemerintah pusat lebih besar dari perubahan pendapatan daerah. Dalam penelitian yang dilakukan pada provinsi Sumatera Utara menemukan bahwa kapasitas fiskal daerah tidak berpengaruh dominan terhadap belanja daerah jika dibandingkan dengan pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Melalui *Flypaper Effect* tampak bahwa provinsi Sumatera Utara belum mandiri dari segi keuangan karena kurang mampu mengelola keuangannya daerah sendiri.

Jika Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja daerah maka nilai Dana Alokasi Umum juga berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini menggambarkan bahwa jika DAU yang diterima oleh pemerintahan daerah maka semakin bertambah pula nilai pemerintahan daerah tersebut. Dapat dikatakan bahwa peran DAU sangat

signifikan karena belanja daerah lebih dominan dari jumlah DAU. Pemerintah daerah yang menerima DAU digunakan untuk belanja pemerintahan daerah, seperti belanja modal, yang sangat berbeda dengan PAD yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintahan daerah. PAD yang meningkat menggambarkan tingkat kemampuan daerah dalam menerima dana yang dialokasikan untuk tujuan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan PAD dalam suatu daerah sejalan dengan peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menanggung beban dan membiayai belanja daerah yang bersifat wajib. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Panggabean, 2014) yang mengatakan bahwa *Flypaper effect* terjadi pada dua hal yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil analisis studi dan pembahasan tentang *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada provinsi Sumatera Utara, maka Secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada wilayah provinsi di Sumatera Utara. Secara Simultan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada wilayah provinsi di Sumatera Utara yang artinya Peningkatan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengakibatkan peningkatan pada jumlah Belanja Daerah yang akan dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara. Terjadi *Flypaper Effect* pada belanja daerah pada pemerintah wilayah provinsi di Sumatera Utara pada 15 Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara dimana nilai DAU lebih besar dari PAD. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi Sumatera Utara belum mandiri dari segi keuangan karena kurang mampu mengelola keuangan daerah sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliawati, Kiki Ninda. (2016). Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Volume, 5 Nomor 2, Februari* .
- Erlina. (2014). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Medan: USU Press.
- Iskandar, I. (2012). Flypaper Effect Pada Unconditional Grant, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung. *Volume13, Nomor 1, Juni 2012*., 113-131.
- Kuncoro, H. (2012). Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia . *SnaX.Unhas Makassar*.<https://Smartaccounting.Files.Wordpress.Com/2011/03/Aspp08.Pdf>.
- Kusumadewi, D. A. (2013). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jaai, Vol 11 No.1*.

- Maimunah, M. (2010). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi IX*.
- Nordiawan, D. (2011). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oktavia, D. (2015). Flypapper Effect Fenomena Serial Waktu dan Lintasa Kabupaten Kota di Jawa Timur 2003 - 2013. .
- Panggabean, F. Y. (2014). Flypaper Effect pada Unconditional Grant dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi Universitas Sumatera Utara* .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Pevcin, P. (2011). *Flypaper Effect In Slovenian Municipal Finances*. . Universitas of Slovenia .
- Renyowijoyo, M. (2010). *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba, Edisi 2*. Jakarta : Mitra Wacana Media .
- Santoso, I. (2014). *Flypaper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi Lampung*.
- Suryantini, N. P. (2017). *The Influence Of Dau (General Allocation Fund) And Dak (Special Allocation Fund) On Capital Expenditure Of Bali Province*.
- Tampubolon, L. P. (2011). *Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Propinsi Riau, Skripsi. Universitas Sumatera Utara* .
- Widjajakoesoema, A. S. (2011). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri* .